



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10
TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 70);
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Tahun 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8);

11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Tahun 2020 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 70) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

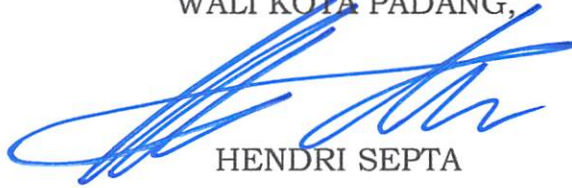
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 28 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 10

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar	Rata-rata lama sekolah	<i>rata – rata lama sekolah pada tahun n</i>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Harapan lama sekolah	<i>rata – rata harapan lama sekolah pada tahun n</i>		
1	2	3	4		5
					Perangkat Daerah Penanggung Jawab

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
			$\frac{\text{jumlah balita pendak dan sangat pendak dalam suatu wilayah dan periode tertentu}}{\text{jumlah balita yang dikur panjang badan/tinggi badan dalam suatu wilayah dan periode tertentu}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki – laki}} \times 100\%$	DP3AP2KB
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Pengeluaran perkapita pada tahun n	Bappeda

No.	1	2	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya Layanan Transportasi Perkotaan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan (nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan (nilai)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan pada tahun n	Dinas Perhubungan
6.	Meningkatnya Permukiman Layak Huni	Persentase Permukiman dan Yang Layak	$\frac{\text{Luas Permukiman dan Permukiman Layak}}{\text{Luas Permukiman Kota Padang}} \times 100\%$	Dinas Permukiman Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7.	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat	Angka Kriminalitas	Angka Kriminalitas pada tahun n	Satpol PP	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
8.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun n	Dinas Lingkungan Hidup
		Luas Kawasan Kumuh yang ditangani	Luas Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun n	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	1	2	3	4	5	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10.	Meningkatnya Tingkat perekonomian Penduduk	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk pada tahun } n} \times 100\%$	Dinas Sosial, Bappeda	Bappeda	$\frac{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	Bappeda	DPMPTSP	
11.	Meningkatnya Investasi	Peningkatan nilai PMA (US \$)		DPMPTSP	DPMPTSP	$\text{Jumlah nilai PMA (US \$) pada tahun } n$			
12.	Meningkatkan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PD RB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PD RB Sektor perdagangan}}{\text{Jumlah Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$	Dinas Perdagangan					

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
13.	Mengadakan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf)	$\frac{\text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (tahun n)} - \text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (n - 1)}}{\text{jumlah pelaku usaha kreatif tahun n}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
14.	Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan pariwisata yang unggul dan Berdaya Saing	Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat	$\frac{\text{jumlah kunjungan Pariwisata Kota Padang}}{\text{jumlah kunjungan Pariwisata Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata
15.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Destinasi	Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara	Jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun n	Dinas Pariwisata
		Jumlah Kunjungan Wisata Domestik	Jumlah kunjungan wisata domestik pada tahun n	Dinas Pariwisata

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	1	2	3	4	5	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
16.	Meningkatnya kemampuan penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh Bencana	$\frac{\text{jumlah kelurahan tangguh dan tanggap bencana}}{\text{jumlah Kelurahan}} \times 100\%$						BPPD
17.	Berkurangnya dampak kebakaran dan penyelamatan kedaruratan lainnya	Persentase Bencana yang ditangani	$\frac{\text{jumlah bencana yang tertangani}}{\text{jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$						Dinas Pemadam Kebakaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
18.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	BPKAD, Inspektorat
19.	Meningkatnya Kinerja Birokrasi	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Kota Padang pada tahun n	Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota	Nilai laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun n	Bagian Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
20.	Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik	$\frac{\sum \text{Nilai persepsi per unsur}}{\sum \text{Total unsur yg terisi}} \times \text{nilai penimbang}$	Bagian Organisasi
	Indeks Kemudahan Perizinan daerah	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Kemudahan Perizinan Daerah pada tahun n Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun n	DPMPTSP Dinas Kominfo


 HENDRI SEPTA
 WALI KOTA PADANG,